



Akulturasasi & Hegemoni Orang Bugis di Tanah Kaili Pada Abad Ke Xix

INFO PENULIS

Andriansyah
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
andrimahid@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, Desember 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Andriansyah. (2025). Akulturasasi & Hegemoni Orang Bugis di Tanah Kaili Pada Abad Ke Xix. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5576-5583.

Abstrak

Sejak dahulu suku Bugis dikenal sebagai salah satu suku yang gemar merantau. Hal itu didasari oleh kepercayaan orang Bugis yang menyatakan bahwa nasib seseorang akan baik apabila telah meninggalkan kampung halamannya. Pandangan inilah yang mempengaruhi orang Bugis dalam melakukan perantauannya (Pasompe). Masyarakat Bugis memiliki dinamika masing-masing di daerah perantauannya, termasuk di tanah Kaili, Lembah Palu. Olehnya itu, penelitian ini mengkaji fenomena migrasi Bugis dan perkembangannya di tengah-tengah masyarakat Kaili di wilayah ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang-orang Bugis di tanah Kaili pada akhir abad ke-20 mengalami perkembangan mobilitas sosial yang cukup tinggi sehingga mereka cenderung memiliki hegemoni ketimbang penduduk asli.

Kata kunci: Bugis Migration; Social Mobility; Hegemony.

Abstract

Since ancient times, the Bugis people have been known as one of the ethnic groups with a strong tradition of migration. This tradition is rooted in the Bugis belief that a person's fate will improve after leaving their homeland. Such a worldview has significantly influenced the Bugis practice of migration, commonly referred to as pasompe. In the regions where they settle, the Bugis community develops its own social dynamics, including in the Kaili land of the Palu Valley. Therefore, this study examines the phenomenon of Bugis migration and its development within the Kaili society in this region. The findings reveal that by the late twentieth century, the Bugis people in the Kaili land experienced a relatively high level of social mobility, which led them to exercise social hegemony in comparison to the indigenous population.

Key Words: Bugis Migration, Social Mobility, Hegemony.

A. Pendahuluan

Penulisan tentang studi migrasi orang Bugis ke lembah Palu dengan menggunakan kajian sejarah masih kurang, padahal migrasinya orang Bugis ke Sulawesi Tengah telah terjadi sejak abad ke-16 bahkan diperkirakan jauh sebelum itu. Orang-orang Bugis sejak dahulu telah dikenal sebagai masyarakat yang senang merantau dan juga merupakan pelaut ulung. Mereka diketahui telah mengarungi perairan yang begitu luas, ke barat sampai ke Madagaskar dan ke Timur sampai ke Irian dan Australia. Perkampungan suku bangsa Bugis terdapat di hampir semua pantai dan pelabuhan di kepulauan Nusantara. Perkampungan Bugis terdapat di tiap kota pelabuhan Indonesia dan perkampungan nelayan Bugis terdapat di hampir semua pulau di kawasan nusantara.

Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh wilayah di pulau Sulawesi menjadi tempat migrasi orang-orang Bugis. Demikian pula halnya di Lembah Palu, Sulawesi Tengah. Suku Bugis di daerah ini menyebar secara massif. Migrasi mereka ke Lembah Palu bukanlah suatu tingkah laku sosial yang sifatnya spontanitas dan hanya dimiliki oleh individu tertentu saja, melainkan hal yang kolektif dan telah berakar sejak dahulu kala yang dapat dilihat dari kisah perantauan tokoh-tokoh legenda Bugis seperti Sawerigading. Kisah perantauan Sawerigading ke Lembah Palu yang tersebar di kalangan masyarakat Kaili memperlihatkan adanya ikatan historis pada masa kerajaan yang terpaut erat di antara kedua suku bangsa ini. Migrasi orang Bugis ke Lembah Palu yang diketahui terjalin sejak abad ke-16 pada mulanya didasari oleh kepentingan ekonomi. Migrasi orang Bugis dengan tipologi perdagangan lebih menitikberatkan pada usaha pencaharian hidup yang lebih mapan dan tidak lepas dari sikap rantau orang Bugis yang merupakan tradisinya. Oleh sebab itu migrasi orang Bugis ditinjau dari sudut ekonomi perdagangan pada masa itu adalah melakukan kontak dagang dengan penduduk setempat yang bermukim di Lembah Palu sebagai salah satu cara pencaharian hidup yang lebih baik.

Seiring dengan berjalannya waktu dan tingginya intensitas interaksi antara Bugis dan Kaili terjalin pertalian darah yang dibina oleh kedua suku bangsa ini yang mempererat hubungan antara keduanya. Interaksi yang terbina dengan baik itu membuat unsur-unsur kebudayaan Bugis mulai berpadu dan diakomodasi ke dalam unsur-unsur kebudayaan Kaili. Tahap kedatangan migrasi orang Bugis ke Lembah Palu pada periode tertentu mempunyai motif, tujuan dan frekuensi yang berbeda-beda.

Berbagai kajian mengenai aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik para migran Bugis telah banyak dilakukan oleh beberapa ahli. Ismail wekke (2012), misalnya mengkaji tentang aspek budaya perkawinan Bugis di Papua Barat. Penelitiannya ini memperlihatkan bahwa walaupun orang Bugis sudah tidak menempati tanah leluhurnya, bahkan jauh berada di daerah lain, ternyata ada keteguhan untuk tetap menjalankan tradisi pernikahan menurut adat Bugis secara turun-temurun. Dari aspek politik para migran Bugis, Ammarel (2002) mengemukakan bahwa cara orang-orang Bugis di perantauan seringkali menunjukkan pola sebagai agen asimilasi yang bermain dalam ranah tataran elit yang berkuasa. Dengan demikian eksistensi mereka dapat terjaga dalam situasi lokal yang terjadi. Acciaioli (2000 & 2004) berupaya melihat aspek sosial ekonomi masyarakat Bugis di danau Lindu, Sulawesi Tengah.

Penelitian-penelitian di atas dapat dikatakan hanya dilihat dari perspektif antropologis dan terfokus pada kegiatan-kegiatan orang Bugis di perantauan. Penelitian-penelitian itu belum melihat secara mendalam bagaimana interaksi dan dinamika yang terjadi antara orang Bugis dengan penduduk asli di tempat perantauan mereka. Dari segi spasial, penelitian mengenai orang Bugis di Lembah Palu masih jarang dilakukan. Olehnya itu, penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai dinamika masyarakat Bugis dan Kaili di Lembah Palu yang ditinjau secara historis. Dengan memperhatikan dinamika para migran Bugis serta berbagai mobilitas sosial yang terjadi maka akan diketahui seperti apa perkembangan masyarakat Bugis di tengah-tengah masyarakat Kaili di Lembah Palu. Dalam perantauannya di Lembah Palu, orang-orang Bugis memainkan peran yang signifikan terhadap perubahan sosial masyarakat di wilayah ini. Artikel ini membahas peran orang Bugis dalam akulturasi dan hegemoninya pada awal abad XX di wilayah Lembah Palu. Sumber-sumber primer yang digunakan dalam tulisan ini adalah arsip-arsip Kolonial Belanda, berupa memorie van overgave kontrolir yang pernah memerintah di wilayah Kaili dan Kolonial verslaag.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian historis-sosiologis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses migrasi orang Bugis (pasompe), dinamika akulturasi budaya, serta terbentuknya relasi hegemoni sosial mereka di tengah masyarakat Kaili di Lembah Palu sejak abad ke- XIX hingga perkembangannya pada akhir abad ke-20.

Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen, dengan menelaah sumber-sumber sejarah seperti arsip kolonial, laporan etnografi, catatan perjalanan, karya ilmiah, serta literatur yang relevan dengan migrasi Bugis, sejarah sosial Sulawesi Tengah, dan masyarakat Kaili. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu dan tulisan-tulisan akademik yang membahas interaksi antaretnis, akulturasi budaya, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat lokal.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif-interpretatif, yaitu mengkonstruksikan fakta-fakta historis dan sosial untuk menjelaskan pola migrasi Bugis, proses adaptasi dan akulturasi budaya dengan masyarakat Kaili, serta perkembangan mobilitas sosial yang berimplikasi

pada terbentuknya hegemoni sosial orang Bugis di wilayah tersebut. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini memanfaatkan perspektif akulturasi budaya dan hegemoni sosial sebagai kerangka konseptual dalam membaca relasi kuasa dan perubahan struktur sosial yang terjadi.

C. Hasil dan Pembahasan

Masyarakat Multi-Etnis di Lembah Palu

Dalam laporan Walter Kaudern disebutkan bahwa penduduk pribumi yang bertempat tinggal di wilayah lembah dan pesisir pantai Palu dinamakan "Toraja". Istilah Toraja bagi masyarakat lembah Palu pertama kali digunakan pada akhir abad ke-19 oleh misionaris Belanda N. Adriani dan Albert Christian Kruyt untuk menyebut penduduk pribumi yang menempati wilayah Sulawesi Tengah. Oleh keduanya, sebutan Toraja digunakan untuk mengidentifikasi penduduk di pedalaman Sulawesi Tengah yang pada saat itu belum menganut agama, baik Islam maupun Kristen. Sebutan ini dipilih untuk menggantikan sebutan "Alfuru" yang sebelumnya digunakan sebagai nama kolektif untuk menyebut penduduk di pedalaman Sulawesi, Buru, Seram, Halmahera dan Kepulauan Maluku. Baik istilah Toraja maupun Alfuru keduanya mengandung pengertian yang hampir sama, yaitu suatu kelompok masyarakat yang belum beragama Islam maupun Kristen atau masih dianggap kafir. Namun, istilah Alfuru memiliki konotasi negatif, sebab sering mengandung pengertian belum beradab. Olehnya itu, Kruyt dan N. Adriani secara sadar menggunakan istilah Toraja sebagai nama tersendiri bagi kelompok masyarakat di Sulawesi Tengah untuk menghindari pengertian "merendahkan" yang terkandung dalam istilah Alfuru. Penggunaan istilah itu kemudian menjadi rujukan dan selalu digunakan oleh para sarjanawan Belanda awal abad 20 untuk menyebutkan penduduk pribumi yang mendiami lembah Palu dan Sulawesi Tengah secara umum, bahkan kebiasaan itu diikuti oleh sarjanawan Indonesia hingga pertengahan abad keduapuluh yang masih menggunakan sebutan Toraja dalam literatur-literatur untuk menyebut penduduk pribumi Sulawesi Tengah, termasuk Palu.

Kruyt melakukan kategorisasi terhadap "suku" Toraja yang berada di Sulawesi Tengah menjadi 3 kelompok besar, yaitu Toraja Barat (tersebar di wilayah Parigi dan Palu), Toraja Timur (tersebar di wilayah Poso dan Tojo), dan Toraja Selatan (tersebar di wilayah Makale, Rantepao, Masamba, dan Mamasa). Pengelompokan suku Toraja menjadi tiga kelompok itu didasarkan atas perbedaan unsur-unsur kebudayaan yang menonjol, terutama sistem kesatuan bahasa. Berdasarkan pengelompokan tersebut, masyarakat Kaili di lembah Palu masuk dalam kelompok Toraja Barat. Adapun pengelompokan penduduk Toraja Barat antara lain: kelompok Lore, kelompok Rampi, kelompok Kulawi, kelompok Pakuli, kelompok Pakawa, kelompok Sigi, dan kelompok Kaili. Kelompok yang disebut terakhir meliputi Palu, Banawa, Tawaeli, Parigi, Tatanga, Sausu, Kaleke, dan Kawatuna.

Pada awal abad 20 komposisi penduduk di wilayah Palu telah beranekaragam dengan hadirnya berbagai macam etnis di wilayah ini. Hal itu dapat dilihat dari sensus penduduk tahun 1930 yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda di seluruh daerah kekuasaannya termasuk di wilayah Palu. Adapun jumlah dari pada penduduk yang mendiami wilayah Palu tahun itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I
Keadaan Penduduk Landschap Palu Tahun 1930
Diperinci Menurut Jenis Kelamin

No	Asal-usul	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Pribumi	15.855	16.677	32.532
2.	Orang Cina	203	127	330
3.	Orang Asiatis Arab	116	73	189
4.	Orang Eropa	15	15	30
		16.189	16.892	33.081

Dari sensus di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang berdiam di wilayah Landschap Palu berjumlah 33.081 jiwa. Jumlah tersebut di dominasi oleh etnis pribumi (penduduk asli Kaili saat itu masih disebut Toraja) dengan jumlah 32.532 jiwa dengan rincian 15.855 pria dan 16.677 wanita. Posisi kedua ditempati oleh orang-orang Cina dengan jumlah 330 jiwa yang terdiri dari 203 pria dan 127 wanita. Sementara orang-orang Arab menempati urutan ketiga dengan jumlah 189 jiwa yang terdiri dari 116 pria dan 73 wanita. Posisi terakhir ditempati oleh orang Eropa dengan jumlah 30 jiwa yang terdiri dari 15 pria dan 15 wanita. Jika dilihat jumlah penduduk orang-orang Eropa yang memiliki jumlah pria dan wanita yang sama, kemungkinan setiap prianya membawa pasangan ataupun istri mereka di tempat tugasnya.

Mengenai jumlah penduduk Palu setelah tahun 1930 sulit untuk diketahui. Hal ini dikarenakan suasana yang tidak kondusif. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya hal tersebut, diantaranya: masa pendudukan jepang (1942-1945) dan revolusi fisik (1945-1947) yang menyebabkan tidak adanya sensus penduduk pada periode-periode tersebut. Demikian juga halnya pada tahun 1955-1957 dimana terjadi gangguan keamanan oleh DI/TII dan Permesta sehingga tidak ditemukan data tentang jumlah penduduk di wilayah Palu. Setelah tiga puluh tahun kemudian, tepatnya 1961 kembali diadakan sensus penduduk di

wilayah Palu dan sekitarnya. Adapun jumlah penduduk dan desa dalam masing-masing wilayah administratif Palu (kecamatan) tahun 1960 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II
Keadaan Penduduk Kota Palu Tahun 1961
Diperinci Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Banyaknya Desa	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Palu Timur	18	12.937	12.020	24.957
2.	Palu Tengah	19	6.566	6.824	13.390
3.	Palu Barat	23	6.769	7.029	13.798
		60	26.272	25.873	52.145

Tabel diatas menunjukkan penduduk Palu pada 1961 mencapai 52.145 jiwa dengan rincian penduduk pria sejumlah 26.282 jiwa dan penduduk wanita sejumlah 25.873 jiwa. Perkembangan penduduk Kota Palu selama tiga puluh tahun tersebut menunjukkan peningkatan kepadatan penduduk yang tadinya hanya berkisar 33.081 jiwa pada tahun 1930, kini meningkat mencapai 52.145 jiwa pada tahun 1961. Ini berarti ada kenaikan sejumlah 19.064 jiwa.

Palu sebagai sebuah kota dalam laporan sensus penduduk tahun 1961 masih terbagi dalam tiga wilayah administratif, yaitu Palu Timur, Palu Tengah, dan Palu Barat. Wilayah Palu Timur mempunyai 18 desa, sedangkan Palu Tengah memiliki 19 desa dan Palu Barat mempunyai 23 desa. Yang menarik dari laporan sensus di atas adalah adanya desa-desa urban (kota) yang hanya terletak pada wilayah Palu Timur. Desa-desa urban itu dimaksudkan sebagai tempat tinggal dan menetap para pendatang dari luar Palu. Desa-desa urban yang dimaksud adalah Talise, Besusu, Lolu, Maesa, Tatura, Ujuna/Banja, Kamonji, Kampung Baru dan Kampung Lere. Desa-desa urban tersebut pada masa pemerintahan Belanda sudah banyak bermukim berbagai etnis, seperti Cina, Bugis, Melayu (Minangkabau) dan Arab yang bahkan masih bertahan hingga kini.

Adapun jumlah penduduk yang menempati wilayah desa urban di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III
Keadaan Penduduk Desa Urban Kota Palu Tahun 1961
Diperinci Menurut Jenis Kelamin

No	Desa Urban	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Talise	924	824	1.748
2.	Besusu	1.202	1.181	2.383
3.	Lolu/Maesa	2.088	1.759	3.847
4.	Ujuna/Banja	1.782	1.331	2.813
5.	Kamonji	775	716	1.491
6.	Kampung Baru	1.217	1.108	2.325
7.	Kampung Lere	584	523	1.107

Akulturas Kaili-Bugis di Lembah Palu

Etnis Kaili merupakan etnis terbesar di Lembah Palu. Etnis ini terbagi lagi dalam beberapa sub-etnis yang menggunakan dialek yang berbeda-beda. Setidaknya, terdapat sekitar 20 (duapuluh) dialek dalam bahasa Kaili, seperti: Kaili Ledo, Kaili Rai, Kaili Ija, Kaili Unde, Kaili Inde, Kaili Ado, Kaili Edo, Kaili Tara, Kaili Doi, Kaili Da'a dan lainnya. Sebagai sebuah kesatuan, etnis Kaili memiliki kesamaan budaya dan adat istiadat di kalangan mereka, sebagaimana dikemukakan oleh Mattulada bahwa orang Kaili mengidentifikasi diri sebagai To Kaili karena adanya persamaan dalam bahasa dan adat istiadat leluhur yang sama yang dipandang menjadi sumber asal mereka. Meskipun memiliki dialek yang berbeda antara sub-etnis, namun orang Kaili umumnya mengerti dengan dialek lainnya. Bahasa Kaili Ledo digunakan sebagai bahasa persatuan (Linguafranca) antar orang Kaili di Lembah Palu.

Berdasarkan sebaran pemukimannya, orang Kaili dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni: Pertama, Orang Kaili Pesisir adalah orang Kaili yang bermukim di pesisir pantai Selat Makassar, Teluk Palu, dan Teluk Tomini. Umumnya mereka bekerja sebagai petani dan nelayan, serta pegawai negeri. Jika dibandingkan dengan orang Kaili pedalaman dan pegunungan, orang Kaili Pesisir relatif lebih cepat dalam menerima perubahan dan modernisasi. Kondisi geografis pemukiman mereka yang terletak di pesisir, memungkinkan mereka lebih mudah untuk mengadakan kontak budaya dengan dunia luar. Suku Kaili yang termasuk golongan ini, yakni Suku Kaili Rai, Kaili Unde, Kaili Tara dan sebagian Kaili Ledo. Kedua, Orang Kaili Pedalaman adalah orang Kaili yang letak pemukimannya berada di pedalaman, khususnya di Lembah Palu. Umumnya mereka bermata pencaharian di bidang agraris. Pengaruh dunia maritim dalam aktivitas perekonomian relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan orang Kaili Pesisir. Suku Kaili yang termasuk dalam golongan ini, yakni Kaili Ledo, Kaili Ija, Kaili Ado dan Kaili Edo. Ketiga, Orang Kaili Pegunungan, yakni orang Kaili yang bermukim di daerah pegunungan, seperti di Pegunungan Gawalise (Pegunungan Verbeek), Pegunungan Fennema, dan di sepanjang pegunungan antara Pantai Barat dan

Pantai Timur di perbatasan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. Mereka umumnya bekerja sebagai petani ladang dan kebun. Meskipun sudah beragama (Islam dan Kristen), kepercayaan animisme masih mengakar kuat dalam tradisi masyarakat kaili pegunungan. Suku Kaili yang termasuk dalam golongan ini, yakni Kaili Inde, Kaili Da'a, sebagian Kaili Unde dan sebagian Kaili Ledo.

Stratifikasi masyarakat Kaili terdiri atas beberapa golongan, yakni (1) Golongan Madika, mereka yang menduduki posisi puncak dalam struktur masyarakat ini adalah Raja dan keluarganya (Kaum Bangsawan). Golongan ini terbagi lagi dalam beberapa tingkatan, tergantung dari "kemurnian" darah kebangsawanannya; (2) Golongan Totua Ngata, yakni tokoh-tokoh yang tidak berdarah bangsawan, tetapi memiliki keahlian dan kecakapan tertentu seperti tetua kampung, ulama dan guru agama, Sando (dukun/tabib), serta pandai besi. Golongan agamawan biasa diangkat sebagai penasihat raja atau biasa disebut Kadi; (3) Golongan Ntodea, yakni masyarakat umum yang merdeka (bukan budak) dengan segala macam profesinya, seperti pedagang, petani dan peternak; dan (4) Golongan Batua atau golongan budak.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan raja merupakan gambaran dari bentuk hubungan patronase pada masyarakat Kaili di masa lampau. Ketika seorang raja atau bangsawan (patron) melakukan suatu acara atau pesta, maka rakyat secara sukarela akan menyediakan tenaga, materi, dan segala sesuatu yang dapat membantu sang patron. Ada beberapa keistimewaan Raja di tanah Kaili pada masa lampau, seperti Raja berhak memungut pajak atas barang-barang yang diperjualbelikan ataupun hasil hutan yang dikumpulkan oleh warganya. Penyerahan wajib ini dilakukan secara struktural. Selain pajak, raja juga memiliki sawah luas yang harus digarap secara gotongroyong oleh warganya. Ternaknya juga digembalakan oleh warga dan istananya harus dirawat oleh warganya. Setelah selesai panen sebagian kecil hasil sawah diberikan kepada para penggarap tetapi sebagian besar tetap dimiliki oleh raja. Raja memperoleh pendapatan sepuluh persen dari produk yang dipungut dari hasil hutan seperti rotan, damar dan kayu. Dalam perdagangan, raja berhak meminta hadiah dari para pedagang asing. Selain itu ketika raja membeli barang dari pedagang asing, harganya harus murah. Sebagai balasan terhadap kewajiban terhadap raja, rakyat berhak mendapatkan perlindungan dari raja. Ketika mendapat serangan musuh, ia berhak dilindungi oleh raja beserta aparatnya. Perlu diketahui, zaman dahulu di wilayah Sulawesi Tengah, seperti pada masyarakat Pamona, Napu, Bada dan Kulawi dan Kaili terdapat kebiasaan perang antarsuku. Dalam perang antarsuku ini terdapat kebiasaan Mengayau (memenggal kepala musuh). Prestise seseorang akan naik apabila ia berhasil mangayau banyak kepala musuh. Oleh karena itu, seorang raja beserta segenap aparat pemerintahannya harus dapat melindungi warganya dari serangan musuh. Tradisi mengayau baru mulai hilang atas upaya pemerintah kolonial Belanda.

Kedatangan suku Bugis di tanah Kaili membawa pengaruh terhadap tatanan sosial di wilayah ini. Unsur-unsur kebudayaan suku Bugis lambat-laun diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan suku Kaili. Proses akulturasi ini umumnya terjadi melalui jalur pernikahan antara bangsawa Bugis dengan Kaili di lembah Palu. Melalui pernikahan itu, kedua unsur itu saling berpadu antara satu sama lain yang dimulai dari golongan atas atau bangsawan Kaili lalu menyebar ke golongan-golongan bawah. Hasil dari akulturasi antara dua kebudayaan tersebut dapat dilihat dalam sistem pemerintahan kerajaan Kaili. Semula kekuasaan di wilayah kerajaan Kaili dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut Madika. Madika dibantu oleh seorang Baligau, seorang Pabicara, dan seorang Tadulako. Jika dilihat dari konteks ini, maka terlihat bahwa alat kelengkapan pemerintahan masih sangat sederhana seperti di atas tadi. Hanya ada tiga orang pembantu Madika. Dengan adanya pengaruh Bugis, maka konsep pemerintahan di Kerajaan Kaili mengalami perkembangan di mana seorang Madika yang juga disebut Magau dibantu oleh tujuh orang pembantu utamanya, yaitu: (1) Madika Malolo, bertugas sebagai Wakil Magau biasanya dijabat oleh calon pengganti Magau (Putera Mahkota), syaratnya sama dengan pemilihan Magau; (2) Madika Matua, Perdana Menteri merangkap urusan luar negeri dan ekonomi. Madika Matua diangkat dan diberhentikan oleh Magau, atas persetujuan Baligau; (3) Punggawa (Menteri Dalam Negeri); (4) Galara (Menteri Kehakiman); (5) Tadulako (Menteri Pertahanan dan Keamanan); (6) Pabisara (Menteri Penerangan); (7) Sabandara (Menteri Perhubungan Laut). Di Kerajaan Banawa bahkan mempunyai tujuh anggota dewan kerajaan, disebut Hadat Pitu Kota E, yang menyandang gelar Bugis Aru, sementara gelar para kepala adat adalah Totuwa. Anak-anak dan cucu-cucu penguasa disebut Amamaku puwa Madika, sementara pewaris tahta bergelar Madika Malolo. Para pangeran keturunan raja disebut Madika Langae, para putrinya disebut Madika Randaa.

Akulturasi Bugis di lembah Palu dapat dilihat pula dari legenda Sawerigading yang tersebar di wilayah Kaili. Dikisahkan bahwa Sawerigading pertama kali menginjakkan kakinya di tanah Kaili tepatnya di ibukota Kerajaan Pujananti (sekarang dikenal dengan nama Donggala). Hal ini sesuai dengan kondisi geografis Kerajaan Pujananti yang berada di daerah pesisir pantai Teluk Palu. Posisi geografis itu memudahkan masyarakat Kaili untuk mengadakan kontak budaya dengan dunia luar, termasuk dengan suku Bugis. Aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah ini tidak hanya bertumpu pada sektor agraris, tetapi juga pada sektor maritim. Terlebih lagi keadaan pantainya memudahkan orang turun ke laut, sehingga penduduknya lebih bergairah untuk mencari hubungan luar melalui laut. Di wilayah ini, Sawerigading menjalin persahabatan dengan Raja Pujananti. Hal ini merupakan salah satu model orang Bugis dalam menghadapi situasi atau kondisi baru yang dihadapi. Mereka mengandalkan diplomasi dengan menjalin persekutuan dengan orang ataupun negara lain. Politik seperti ini pernah diterapkan oleh Kerajaan Bugis yang bertetangga, yaitu Kerajaan Bone, Kerajaan Soppeng dan Kerajaan Wajo. Persekutuan mereka dikenal dengan sebutan tellumpoccoE (tiga puncak). Pembentukan persekutuan ini merupakan salah satu upaya untuk menghadapi politik ekspansi Kerajaan Gowa.

Adapun jika ingin berhasil di perantauan, Orang Bugis harus memegang teguh semboyan: Malilu Sipakainge, Rebba Sipatokkong, Mali Siparappe. Makna semboyan tersebut, yakni Malilu Sipakainge artinya bila salah saling mengingatkan, Rebba Sipatokkong artinya bila rubuh ditolong, Mali Siparappe artinya kalau hanyut dibantu. Prinsip ini telah menjadi semboyan hidup yang harus dilakoni oleh mereka yang berasal dari Sulawesi Selatan (Bugis-Makassar) di mana saja dia berada.

Dikisahkan kemudian bahwa Sawerigading melanjutkan perjalanannya menuju Kerajaan Sigi. Di sana Ia bertemu dengan penguasa Sigi yang dikenal sebagai seorang perempuan cantik bernama Ngilinayo. Sawerigading langsung jatuh cinta kepada sang Ratu Sigi tersebut. Ia kemudian meminang Ngilinayo. Ngilinayo bersedia menerima pinangan tetapi dengan syarat tertentu, yakni ayam Sawerigading yang bernama Bakka Cimpolong, harus diadu dengan ayamnya bernama I Callabai. Kisah ini dapat menggambarkan realitas sosial budaya orang Bugis di tanah Kaili. Upaya Sawerigading untuk menikah dengan Ngilinayo merupakan salah satu bentuk strategi masyarakat Bugis di perantauan. Ada tiga strategi orang Bugis dalam perantauan, yakni dengan menggunakan strategi tiga 'ujung' (tella cappaq). 'Ketiga ujung' yang dimaksud adalah ujung lidah, ujung badik, dan ujung penis. Jika seorang Bugis tidak dapat mengambil hati pemimpin setempat dengan cara diplomasi (dengan keterampilan ujung lidah), maka dia mungkin akan menggunakan jalan pertempuran (dengan mengandalkan ujung badik). Namun, strategi, yang paling baik, yang memungkinkannya benar-benar mengintegrasikan diri ke dalam komunitas baru tersebut adalah dengan menikahi seorang (atau lebih) perempuan setempat (dengan memanfaatkan ujung penis).

Dahulu di kalangan raja (magau), baik laki-laki maupun perempuan, perkawinan harus perkawinan Bolai atau perkawinan Kota, yaitu perkawinan bangsawan dalam satu negeri atau antar negeri yang memiliki status dan kedudukan yang sama. Biasanya sebelum diadakan pesta perkawinan di kalangan turunan raja, terlebih dahulu dibicarakan dan ditanyakan siapa yang menjadi calon istri atau calon suami. Orang yang membicarakan dan menanyakan calon istri atau suami adalah dewan adat kerajaan. Cara perkawinan dilakukan dengan melalui cara yang telah diatur oleh dewan adat kerajaan (Kota Pitunggota atau Kota Patanggota). Kadang-kadang waktu antara pertunangan dengan pesta perkawinan sampai 1-2 tahun. Pada zaman dahulu terutama di kalangan bangsawan, apabila terjadi suatu perkawinan dengan suku lain dengan derajat yang sama, maka hal tersebut bisa saja dilakukan. Akan tetapi, bila kawin dengan suku lain yang derajatnya tidak sama, misalnya laki-laki dari suku Kaili menikah dengan wanita dari suku lain dengan derajat yang dinilai lebih rendah dari calon suaminya, maka biasanya mereka disisihkan dalam hubungan kekerabatan mereka. Oleh karena adat perkawinan yang menuntut syarat sama derajat inilah maka banyak wanita-wanita bangsawan yang akhirnya menjadi perawan tua. Apalagi jika pihak wanita dari suku Kaili menikah dengan pria dengan yang lebih rendah, maka wanita itu dikucilkan dan tidak dianggap lagi kerabat mereka. Prinsip perkawinan yang ideal dalam masyarakat Kaili tempo dulu adalah perkawinan yang sederajat atau minimal wanita lebih rendah derajatnya daripada laki-laki.

Intensitas interaksi antara suku Bugis dengan Kaili yang sangat tinggi di Lembah Palu menimbulkan pola hubungan kekerabatan langsung maupun tidak langsung antara kedua suku itu. Menurut Acciaioli, faktor kekerabatan dalam suku Bugis berfungsi sebagai perangkat hubungan yang menyeluruh. Kekerabatan berfungsi sebagai ungkapan bersama yang menjadi kerangka hubungan solidaritas, bahkan mereka yang tidak memiliki hubungan darah dapat dianggap sebagai kerabat. Dalam masyarakat Bugis, dikenal istilah Passilessurengeng, yaitu cara orang Bugis untuk menganggap seseorang sebagai saudara, meski orang itu bukan keluarga atau orang sekampung. Pembentukan ikatan kekerabatan seperti itu bukan sekedar fenomena di perantauan. Di kampung sekalipun, orang luar (to laingngé) dapat dijadikan sebagai kerabat. Oleh karena itu, dalam legenda Sawerigading yang tersebar di Lembah Palu, meski dikisahkan bahwa Sawerigading tidak memiliki hubungan darah dengan Raja Sigi tetapi keduanya dapat menjalin hubungan sebagai kerabat. Dengan demikian, akhir legenda ini menggambarkan hubungan persaudaraan antara Orang Bugis dan Orang Kaili. Hubungan ini berlangsung dengan setara, tidak ada pihak yang direndahkan.

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda kedudukan suku Bugis di Lembah Palu semakin kokoh. Mereka memainkan peran yang sangat signifikan dalam sektor ekonomi. Pimpinan orang Bugis di Donggala bahkan disebutkan memiliki tempat pembiakan ternak yang terdiri dari sapi, kerbau dan kambing, sesuatu yang jarang dijumpai saat itu. Masyarakat Kaili yang tinggal di daerah pesisir, khususnya di daerah Donggala, terdorong oleh contoh kaum pendatang Bugis yang menemukan mata pencaharian dalam penangkapan ikan dan tripang, yang menyebabkan semakin lama semakin banyak orang-orang Kaili mulai menekuni perikanan. Selanjutnya, mereka mulai membuat perahu-perahu kecil dibuat yang digunakan untuk menangkap ikan dan mereka mengelola perdagangan kecil di sepanjang pantai. Meskipun ada lahan bergunung baik di bagian timur maupun barat Kerajaan Banawa yang menghasilkan rotan, dammar dan kayu jati yang indah, ekspor komoditi yang berasal dari daerah ini masih bisa dikatakan sangat rendah. Penduduk Kaili yang masih menganut sifat alaminya menolak usaha keras yang berkaitan dengan pengangkutan barang komoditi ke pantai karena buruknya komunikasi antara daerah pedalaman dan pantai. Meningkatnya aktivitas pedagang Bugis yang bermukim di Donggala membuat wilayah ini perlahan-lahan menjadi pusat perdagangan Kerajaan Kaili di mana semua produk dagang dari pedalaman dan daerah Mandar di Mamuju diangkut dan dijual. Satu hal yang menarik dari aktivitas Bugis dan Kaili di Donggala adalah bahwa melalui pergaulan sehari-hari dengan orang Bugis dan Makasar, penduduk Kaili justru semakin banyak menggunakan bahasa Bugis dan di Banawa,

terutama di daerah pantai, bahasa ini menjadi pengantar. Tidak hanya bahasa, orang-orang Kaili yang lebih banyak tinggal di pantai juga lebih berorientasi pada suku Bugis dalam aspek kehidupan sehari-hari, misalnya mengikuti model rumah mereka. Dari aspek busana, orang-orang Kaili juga sangat terpengaruh dengan gaya berbusana suku Bugis. Sebuah celana pendek Bugis menjadi trend pria Kaili pesisir di Donggala. Sementara itu, kostum wanita terdiri atas sarung katun putih atau berwarna yang ketika digunakan di rumah dengan pekerjaan rumah tangga, diikatkan di atas pundak. Di luar rumah mereka mengenyakannya dengan dibuat simpul di pinggulnya. Dada bagian atasnya ditutup dengan sebuah baju tipis model Bugis dengan lengan pendek.

Hegemoni Bugis di Tanah Kaili

Keunggulan ekonomi dan superitas suku Bugis terhadap pribumi Kaili terutama pada masa Kolonial membuat mereka secara signifikan dapat mempengaruhi penguasa lokal setempat. Tidak jarang ditemukan pengaruh penguasa Kaili sering terancam oleh kedudukan pedagang-pedagang Bugis kaya yang menjalin hubungan dengan pemerintah Belanda. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ammarell (2002) bahwa dalam beberapa kasus orang-orang Bugis di nusantara sering bersekutu dengan pihak kolonial, menetap di dekat pusat pemerintahan dan akhirnya mereka sendiri masuk ke dalam elite yang berkuasa. Orang-orang Bugis Makasar dan orang asing lainnya yang tinggal di sepanjang pantai teluk Palu di daerah Donggala, berada di bawah Mayor Kalangkangan sebagai pimpinan mereka, tetapi karena kebanyakan Mayor ini berada di Mamuju (Mandar), koloni Bugis ini kebanyakan berada di bawah kekuasaan wakilnya dengan gelar Letnan Kalangkangan.

Pada tahun 1854, ketika Gubernur Van der Hart berada di Teluk Palu untuk membuat kontrak bersama tiga orang raja Kaili, seorang tokoh Bugis bernama La Matupuwang Patana La Bandu diangkat menjadi Letnan Kalangkangan yang memimpin koloni Bugis di wilayah ini. Pemilihan itu didasari oleh kuatnya pengaruh Patana La Bandu terhadap raja-raja Kaili di Donggala. Melalui keputusan pemerintah Belanda tanggal 3 Oktober 1871 dia kemudian dianugerahi gelar Kapten Kalangkangan karena dianggap banyak berjasa membantu pemerintah, terutama dalam hal menjaga keamanan wilayah Teluk Palu dan Donggala dari para perompak bajak laut yang sebelumnya beberapa pimpinan perompak itu bahkan mengawini putri raja. Atas jasa dan pengaruhnya itu pula, putra Patana La Bandu yang bernama La Raga diangkat menjadi Letnan Kalangkangan.

Kuatnya pengaruh Bugis di Donggala, bahkan seluruh wilayah Kerajaan Kaili salah satunya dipengaruhi oleh lemahnya campurtangan Pemerintah Kolonial terhadap urusan di wilayah ini, sehingga kurun waktu abad 18 hingga awal abad 19 sering terjadi kerusuhan dan kekacauan di daerah pedalaman Kaili yang secara bergantian dikuasai oleh orang-orang Mandar, Makassar dan Bugis, yang sebelumnya dikuasai oleh Ternate. Beberapa kali pihak Belanda bersedia menerima permohonan bantuan raja-raja Kaili atas kekacauan-kekacauan yang sering terjadi, tetapi ketika kekuatan Bone semakin meningkat, pengaruh Belanda di wilayah ini semakin berkurang. Sebagai bukti betapa berpengaruhnya Bone saat itu dapat dilihat ketika Asisten Residen Schaap berkunjung ke Teluk Palu pada tahun 1847 untuk menyampaikan gambaran tentang pembukaan pos dari pihak pemerintah Belanda kepada raja-raja Kaili, namun para raja-raja itu menyerahkan persetujuannya pada pendapat raja Bone.

Akhir abad 18, tepatnya pada tahun 1790, seluruh daerah Kaili terlepas dari kontrol Belanda. Kemudian baru pada 1824 Belanda memasukkan kembali wilayah Kaili dalam pengaturan pemerintahan atas Celebes di bawah kontrol pemerintahan Belanda di Manado. Kuatnya pengaruh Kerajaan Bone di wilayah Kaili turut memperkuat posisi orang-orang Bugis di Donggala yang dengan demikian turut mempengaruhi keputusan Belanda untuk mengangkat seorang Mayor, Kapten, dan Letnan Bugis untuk membantu kontrol Belanda terhadap penduduk di wilayah ini. Sejak saat itu, atau tepatnya abad ke 19, penguasa Kaili kembali menjalin hubungan persahabatan dengan pemerintah Belanda. Meskipun pada tahun 1824 sebuah kontrak dibuat oleh Komisaris Van Schelle dan Tobias bersama raja-raja Kaili dan ditetapkan bahwa sebuah pos akan didirikan di Teluk Palu, pelaksanaannya baru terealisasi pada November 1891 dengan penempatan seorang posthouder Belanda. kepadanya diperintahkan untuk melakukan pengawasan atas kondisi di kerajaan-kerajaan Kaili, demikian pula atas orang-orang Bugis yang bermukim di sekitar Teluk Palu. Dengan adanya pos tersebut, Teluk Palu menjadi tempat yang dikunjungi oleh banyak perahu tempur Belanda dan hubungan antara raja-raja Kaili dengan pemerintah Belanda di Makassar dilaksanakan lewat perantaraan pimpinan orang-orang Bugis di Donggala yang menerima gelar Mayor yang kepentingan dagangnya menuntut mereka agar menjalin hubungan erat dengan pihak Belanda. Hubungan antara keduanya dapat dilihat pada kesepakatan yang menyatakan bahwa peradilan adat yang ada sejak pemukiman orang-orang Bugis, yang disebut Dewan Tetua, dipimpin oleh Mayor atau Letnan Kalangkangan dan beberapa orang tetua yang duduk sebagai anggotanya akan bersidang di depan posthouder, hanya memiliki hak memberikan nasehat. Vonis yang dijatuhkan oleh peradilan adat ini dalam hal pelanggaran yang dihukum dengan pembuangan di luar daerah Banawa harus disetujui oleh Direktur Kehakiman yang juga akan menunjuk tempat penghukumannya. Tampilnya Mayor atau Letnan Kalangkangan dalam peradilan adat itu memperlihatkan keberhasilan hegemoni Bugis di Kerajaan Kaili.

D. Kesimpulan

Dengan masuknya unsur-unsur kebudayaan Bugis di kalangan bangsawan Kaili, perlahan masyarakat di bawahnya mulai menerapkan hal yang sama. Terlebih lagi intensitas interaksi suku Bugis dengan Kaili yang sangat tinggi diberbagai bidang, terutama perdagangan dan pernikahan menghasilkan akulturasi dan ikatan kebudayaan yang erat antara kedua suku tersebut. Pada masa colonial Belanda, posisi orang-orang Bugis di Lembah Palu semakin kokoh dan strategis akibat kedudukan yang diberikan kepada mereka sebagai Mayor, Kapten, dan Letnan yang bertugas membantu Belanda dalam mengontrol masyarakat di wilayah ini. Dengan posisinya itu, orang-orang Bugis kemudian cenderung memiliki hegemoni yang lebih ketimbang penguasa-penguasa Kaili terutama pada awal abad akhir abad ke-19.

E. Referensi

- Abdullah, M. Djaruddin. 1975. *Mengenal Tanah Kaili*. Palu: Badan Pengembangan Pariwisata Sulawesi Tengah.
- Acciaioli, G. L. 2000. Kinship and debt: The social organization of Bugis migration and fish marketing at Lake Lindu, Central Sulawesi. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 156, No. 3, authority and enterprise among the peoples of south sulawesi (2000), pp. 589-617.
- Acciaioli, G. L. 2004. From Economic Actor to Moral Agent: Knowledge, Fate and Hierarchy among the Bugis of Sulawesi. *Indonesia*, No. 78 (Oct., 2004), pp. 147-179.
- Ammarell, G. 2002. Bugis Migration and Modes of Adaptation to Local Situations. *Ethnology*. Vol. 41, No. 1 (Winter) pp. 51-67.
- Haliadi dan Syakir Mahid. 2006. *Transformasi Sosial, Ekonomi, Dan Politik Kota Palu: Masyarakat Baru Dengan Pemimpin Baru*. Palu: Laporan Penelitian Kerjasama Lab. Studio Pendidikan Sejarah dan Bappeda Kota Palu.
- Kapile, Charles. 2001. "Sejarah Kota Palu 1930-1964", Tesis Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Kaudern, Waltern. *Migration of The Toradja in Central Celebes (Etnographical studies in Celebes: Results of The Author's Expedition to Celebes 1917-1920)*.
- Landschap Donggala 1905. 'Het Landschap Donggala of Banawa'. *Bijdragen tot de Tall-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië* 58: 514-531.
- Masyhuda, Masyhudin. 1991. *Etnik Dan Logat di Sulawesi Tengah*. Palu: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Tengah
- Mattulada. 1985. *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Gadjah Mada University Press.
- Mattulada. 1985. *Sejarah Kebudayaan To Kaili (Orang Kaili)*. Palu: Badan Penerbit Universitas Tadulako.
- Nainggolan, Nurhayati (ed.). 1979. *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Roger Tol, Kees van Dijk dan Greg Acciaioli. *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*. Jakarta:KITLV-Jakarta, Makassar: Inninawa.
- Rumaeda. 2009. *Silsilah Keluarga Juanda Lamakarate: Perkembangan Bentuk Kekerabatan Masyarakat Kaili di Biromaru*. Palu: Skripsi FKIP Universitas Tadulako.
- Sejarah Tanah Kaili Djawatan Penerangan Kabupaten Donggala 1956*
- Singarimbun, Masri. 1961. *Statistik Desa Pulau Sulawesi Dan Maluku 1961*. Jakarta: BPS Pusat dan PSKK UGM.
- Syakir Mahid, Haliadi, dan Syafrullah (Ed). 2009. *Sejarah Sosial Sulawesi Tengah*. Yogyakarta: Kerjasama Disbudpar Sulawesi Tengah, Pusat Penelitian Sejarah (PusSEJ) Untad dan Pilar Media.
- Van Leur dan Verhoeven. 1971. *Teori Mahan dan Sejarah Kepulauan Indonesia*. Jakarta: Bhratara.
- Volksteling 1930*, Dell V, *Inheemsche Bevoking Van Borneo Celebes, De Kleine Soenda Eilanden en De Molukken*, Cencus of 1930 The Netherlands Indie, Departemen Van Economische Zaken.
- Wekke, Ismail Suardi. 2012. *Islam Dan Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Papua Barat*. *THAQĀFIYYĀT*, Vol. 13, No. 2, Desember 2012